

**PROGRAM PRAKTIK KERJA MAHASISWA
KANTOR PERWAKILAN WILAYAH BANK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA
KANTOR PERWAKILAN WILAYAH BANK INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT**



OLEH:

Melza Horiza (20141111102)

**STIE INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA
Jl. Kemang Raya No.35, Jakarta Selatan 12730, Indonesia**

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI BANK INDONESIA KPw JAWA BARAT**

Oleh

Nama : Melza Horiza
NIM : 20141111102
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Januari 2017

Menyetujui

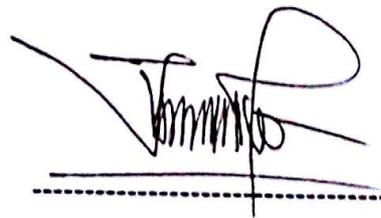
Dosen Pembimbing Praktik Kerja



FAJAR H.

Fajar Hertingkir, S.Sos., MM

Pembimbing Lapangan



Yayan Istiandi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Indonesia Banking School di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Braga No. 8 Bandung, Jawa Barat. Kegiatan Praktik Kerja tanggal 16 - 27 Januari 2017, telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Bank Indonesia.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sebenarnya. Dalam menyelesaikan makalah ini, saya mendapat bimbingan, saran dan banyak bantuan dari berbagai pihak. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto selaku Ketua Indonesia Banking School.
2. Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua I bidang Akademik.
3. Ibu Dr. Nuri Wulandari SE, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Manajemen Indonesia Banking School.
4. Bapak Fajar Hertingkir, S.Sos., MM. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL).
5. Bapak Yayan Istiandi selaku Pembimbing Lapangan yang selama ini telah membimbing dan memantau saya & tim dengan baik.

Jakarta, 19 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan Praktik Kerja.....	7
1.3 Sistematika Laporan Praktik Kerja	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Definisi Bank Sentral	9
2.2 Perkembangan Bank Sentral di Nusantara.....	10
2.3 Bank Indonesia.....	11
2.3.1 Status dan Kedudukan BI.....	12
2.3.2 Visi, Misi dan Sasaran Strategis BI	13
2.3.3 Struktur Organisasi BI	15
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA	20
3.1 Sejarah KPwDN BI Provinsi Jawa Barat.....	20
3.2 Visi, Misi dan Sasaran Strategis KPwDN BI Prov. Jawa Barat	22
3.3 Tugas & Produk Pokok KPwDN BI Prov. Jawa Barat	23
3.4 Struktur Organisasi KPwDN BI Prov. Jawa Barat	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
4.1 Alur Kegiatan Praktek Kerja Lapangan.....	38

4.2 Divisi Advisory Ekonomi & Keuangan	39
4.3 Satuan Layanan & Administrasi	44
4.4 Tim Operasional Sistem Pembayaran	46
4.5 Tim Pengawasan SP, PUR & Keuangan Inklusif	51
BAB V KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tugas & Produk Tim Statistik.....	26
Tabel 3.2 Tugas & Produk Tim Asesmen.....	27
Tabel 3.3 Tugas & Produk Fungsi Koordinasi & Komunikasi Kebijakan.....	27
Tabel 3.4 Tugas & Produk Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM.....	28
Tabel 3.5 Tugas & Produk Unit Distribusi Uang.....	29
Tabel 3.6 Tugas & Produk Unit Layanan & Administrasi.....	30
Tabel 3.7 Tugas & Produk Unit Pengelolaan Uang.....	31
Tabel 3.8 Tugas & Produk Unit Operasional & Sistem Pembayaran.....	31
Tabel 3.9 Tugas & Produk Fungsi Perizinan & Pengawasan SP, PUR & KI.....	32
Tabel 3.10 Tugas & Produk Fungsi Analisis SP, PUR KI & Perlindungan Konsumen.....	33
Tabel 3.11 Tugas & Produk Fungsi SDM, Logistik, Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan.....	33
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan.....	36
Tabel 4.2 Struktur Sistem Pengelolaan Uang Rupiah.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia.....	16
Gambar 3.1 Gedung Baru Bank Indonesia Jawa Barat.....	23
Gambar 3.2 Gedung Lama Bank Indonesia Jawa Barat.....	23
Gambar 3.3 Struktur Organisasi KPw BI Jawa Barat.....	26
Gambar 4.1 <i>Rectoverso</i> di lembaran 1000 dan 100.000.....	58
Gambar 4.2 Isu Palu Arit.....	59
Gambar 4.3 Rupiah cetakan terbaru.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) untuk dunia keuangan & perbankan akan segera dilaksanakan pada tahun 2020. Indonesia, merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang juga akan berpartisipasi dalam kegiatan pasar bebas tersebut, memiliki banyak tantangan yang akan dihadapi untuk bersaing menghadapi negara – negara lainnya. Meningkatkan kompetensi SDM masyarakat Indonesia salah satu cara untuk menghadapi segala tantangan Indonesia, dapat didukung melalui institusi pendidikan yang berkualitas & memberikan program agar mahasiswa yang sudah lulus dapat siap kerja. Indonesia Banking School sebagai perguruan tinggi swasta turut ikut serta dalam meningkatkan kualitas SDM dengan menyusun kurikulum pendidikan berdasarkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dimana lulusannya dibekali beberapa program untuk siap bekerja di lingkungan globalisasi terutama MEA. Salah satunya dengan memfasilitasi mahasiswa/Inya untuk mendapatkan pengalaman & wawasan mengenai dunia kerja melalui program praktik kerja lapangan di kantor perwakilan Bank Indonesia.

1.2 Tujuan Praktik Kerja

Tujuan praktik kerja mahasiswa IBS sebagaimana dalam ketentuan akademik IBS (SK Ketua IBS No.392/KEP/STIE IBS/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015) adalah:

- 1) Melatih mahasiswa di lapangan dalam sektor perbankan yang tidak tercakup dalam proses perkuliahan.
- 2) Memberi kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja sektor perbankan yang relevan dengan profesi yang akan diembannya di masyarakat.
- 3) Memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk kerja di masa depan.

Tujuan lain dari praktik kerja mahasiswa ini adalah

- 1). Untuk melatih sikap mental yang berguna dalam pengembangan attitude yang lebih baik dan
- 2). Dalam rangka upaya bidang akademik untuk melakukan *link and match* kurikulum dengan dunia nyata, sehingga mahasiswa memperoleh jaringan dengan dunia kerja.

Laporan praktik kerja mahasiswa sangat bermanfaat untuk melihat kebutuhan kompetensi dunia kerja khususnya industri perbankan dan dapat menambah aktivitas mahasiswa dan dosen terkait dengan pengabdian masyarakat.

1.3 Sistematika Laporan Praktik Kerja

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi menjadi 5 (lima) bagian:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjadi pembuka dan menjelaskan mengenai latar belakang dari program Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta tujuannya. Penulis juga menjelaskan mengenai sistematika laporan pelaksanaan (PKL) ini.

BAB II: Landasan Teori

Bagian ini menjelaskan mengenai teori tentang definisi bank sentral, sejarah berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral NKRI, fungsi, tugas beserta struktur organisasinya.

BAB III: Gambaran Umum Tempat Praktik

Bagian ini akan memberikan gambaran umum mengenai sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, visi misi, tugas & produk pokok serta struktur organisasinya.

BAB IV: Pembahasan

Pembahasan akan dipaparkan dalam bab ini untuk menjawab tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) terkait dengan gambaran sistem bekerja, fungsi serta peran yang dijalankan setiap divisi/unit nya yang ada di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berdasarkan pembekalan materi yang diberikan dari *stakeholder* serta pengalaman penulis & tim mahasiswa IBS disana.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir dan keseluruhan laporan yang berisi ringkasan dan kesimpulan dari Laporan Praktik Kerja (PKL).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Bank Sentral

Berdasarkan buku Pengantar Kebanksentralan, Dr. Iskandar Simorngkir, SE, MA. Bank sentral merupakan lembaga otoritas yang memiliki peran sentral dan strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi yang berkembang secara dinamis sebagai respon dari semakin tingginya kompleksitas permasalahan ekonomi.

Bank Sentral adalah lembaga keuangan sentral yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Pentingnya peranan bank sentral dapat dilihat dari tiga fungsi utama yaitu (i) fungsi yang terkait sebagai otoritas sistem pembayaran, (ii) fungsi sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dan (iii) fungsi yang terkait sebagai otoritas perbankan dalam menjaga kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga fungsi bank sentral tersebut bervariasi antar bank sentral di masing-masing negara.

Evolusi bank sentral semakin berkembang dengan diberikannya bank sentral kewenangan sebagai otoritas moneter dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, bank sentral pada umumnya mengendalikan uang beredar agar sejalan dengan kegiatan dan kapasitas perekonomian, baik dengan mengendalikan kuantitas uang beredar

maupun dengan pengendalian suku bunga. Melalui pengendalian inflasi yang sejalan dengan kapasitas ekonomi maka bank sentral diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

2.2 Perkembangan Bank Sentral di Nusantara

Jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa, merkantilisme telah berkembang menjadi revolusi industri dan menyebabkan pesatnya kegiatan dagang Eropa. Pada saat itulah muncul lembaga perbankan sederhana, seperti Bank *van Leening* di negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama. VOC di Jawa pada 1746 mendirikan *De Bank van Leening* yang kemudian menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama *De Javasche Bank* (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.

Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan *Nederlandsche Indische Civil Administrative* (NICA). Perbankan pun terbagi

dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI. Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, RI menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.

2.3 Bank Indonesia

Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah, kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No. 23/1999

tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain. Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

2.3.1 Status dan Kedudukan Bank Indonesia

a) Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan

mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

b) Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2.3.2 Visi, Misi dan Sasaran Strategis Bank Indonesia

a. Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

b. Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

c. Nilai-Nilai Strategis

*Trust and Integrity, Professionalism, Excellence, Public Interest,
Coordination and Teamwork*

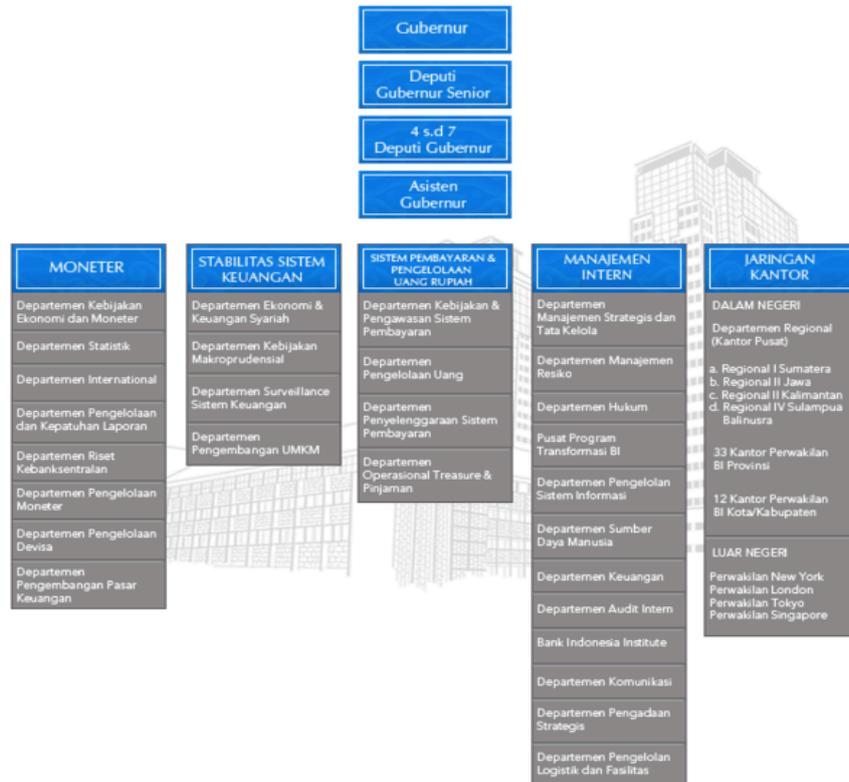
d. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran

1. Menjaga stabilitas nilai tukar
2. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
3. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang didukung dengan penguatan surveillance sistem pembayaran.
4. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
5. Memelihara sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar
6. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
7. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan sistem informasi, kultur, dan governance
8. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
9. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
10. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK

2.3.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia (www.bi.go.id)

a) Dewan Gubernur Bank Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.

b) Moneter

Bank Indonesia membentuk 8 departemen khusus untuk menjalankan misi utama yang kedua, mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, terdiri dari:

1. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
2. Departemen Statistik
3. Departemen Internasional
4. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
5. Departemen Riset Kebanksentralan
6. Departemen Pengelolaan Moneter
7. Departemen Pengelolaan Devisa
8. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

c) Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia membentuk 4 departemen khusus untuk menjalankan misi utama yang kedua, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, terdiri dari:

1. Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah
2. Departemen Kebijakan Makroprudensial
3. Departemen *Surveillance* Sistem Keuangan
4. Departemen Pengembangan UMKM

d) Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah

Bank Indonesia membentuk 4 departemen khusus untuk menjalankan misi utama yang ketiga, mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional, terdiri dari:

1. Departemen Kebijakan & Pengawasan Sistem Pembayaran
2. Departemen Pengelolaan Uang
3. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
4. Departemen Operasional *Treasure* & Pinjaman

e) Manajemen Intern

Bank Indonesia membentuk 12 departemen khusus untuk menjalankan misi utama yang keempat, meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU, terdiri dari:

1. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
2. Departemen Manajemen Resiko
3. Departemen Hukum
4. Pusat Program Transformasi BI
5. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
6. Departemen Sumber Daya Manusia
7. Departemen Keuangan
8. Departemen Audit Intern
9. Bank Indonesia *Institute*
10. Departemen Komunikasi
11. Departemen Pengadaan Strategis
12. Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas

f) Jaringan Kantor

Bank Indonesia memiliki jaringan kantor berupa kantor perwakilan dalam negeri dan luar negeri. Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) yang terdiri dari 33 Kantor Perwakilan BI Provinsi dan 12 Kantor Perwakilan BI Kota/Kabupaten, dibagi menjadi 4 Regional, yaitu:

- a. Regional I Sumatera (13 Kantor)
- b. Regional II Jawa (14 Kantor)
- c. Regional III Kalimantan (5 Kantor)
- d. Regional IV Sulampua Balinusra (13 Kantor)

Sedangkan, Kantor Perwakilan BI Luar Negeri (KPwLN) tersebar di 4 negara yaitu New York, London, Tokyo, dan Singapura.

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA

3.1 Sejarah KPwDN Provinsi Jawa Barat

Salah satu yang disepakati dari Konpres Meja Bundar adalah masih berperannya *De Javasche Bank* sebagai Bank Sentral. Hal ini disebabkan Pemerintah Belanda ingin menjaga kepentingan pembayaran hutang Pemerintah Indonesia yang saat itu mencapai f 4.418,5 juta. Banyak tuduhan kemudian yang muncul yang menganggap kondisi demikian mencerminkan belum adanya kedaulatan penuh atas perekonomian nasional.

Dalam kondisi tersebut, munculah gagasan untuk menasionalisasikan *De Javasche Bank* sebagai alternatif untuk memenuhi harapan banyak pihak sekaligus melindungi kepentingan nasional. 1 Juli 1953 adalah tanggal dimulainya era Bank Indonesia. Masa lima tahun setelah nasionalisasi ini merupakan masa dimana personil-personil eks *De Javasche Bank*, khususnya orang-orang Belanda, masih dipergunakan secara penuh untuk menjalankan fungsi Bank Indonesia.

Untuk kantor Bank Indonesia cabang Bandung, sebagian besar personalia Bank Indonesia, masih dipegang oleh keturunan Belanda dan Cina. Diduga bahwa Pemimpin Cabang Bank Indonesia Bandung pada awal era dimulainya Bank Indonesia adalah mantan pimpinan *De Javasche Bank* Bandung yaitu H.C. Hordijk. J.A. Sereh merupakan putra Indonesia pertama yang

memangku jabatan Pemimpin Cabang di kantor cabang Bandung sejak awal tahun 1958.

Dengan terus berkembangnya sektor perbankan di Jawa Barat maka perlu adanya koordinasi di Jawa Barat untuk mengantisipasi perkembangan yang terus meningkat. Untuk itu, sejak tanggal 19 Maret 1986, Bank Indonesia Kantor Cabang Bandung ditetapkan sebagai koordinator kantor-kantor cabang Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat.

Dalam rangka mengantisipasi aktivitas sektor perbankan dan jumlah pegawai yang kian meningkat, keadaan gedung kantor lama dipandang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi. Untuk itu didirikanlah gedung baru yang terletak di atas tanah seluas kurang lebih 1.500 meter persegi dengan luas keseluruhan kurang lebih 10.000 meter persegi.

Telah banyak terjadi restrukturisasi dan reorganisasi pada Kantor Perwakilan Dalam Negeri Jawa Barat sesuai kebutuhan dan keadaan zaman. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Jawa Barat dua tahun belakangan menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia terbaik di Indonesia.



Gambar 3.1 Gedung Baru Bank Indonesia Jawa Barat

(sumber: kaskus.co.id)



Gambar 3.2 Gedung Lama Bank Indonesia Jawa Barat

(sumber: www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata)

3.2 Visi, Misi dan Sasaran Strategis KPwDN BI Provinsi Jawa Barat

1. Visi

Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai *economic intelligence* dan unit penelitian.

2. Misi

Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait.

3. Sasaran Strategis

1. Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Pusat dan Pengembangan ekonomi di wilayah kerja.

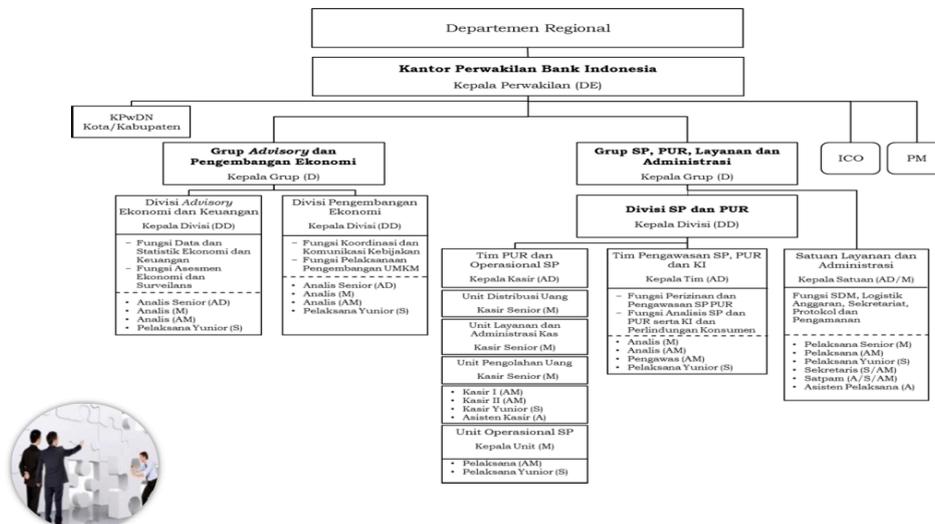
2. Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah.
3. Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
4. Pengeleloaan keuangan satker secara efektif dan efisien.
5. Mengoptimalkan hasil kajian penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja.
6. Meningkatkan pengawasan bank yang efektif yang mendukung pengembangan ekonomi di wilayah kerja.
7. Meningkatkan pelayanan dan prasarana sistem pembayaran.
8. Meningkatkan kemitraan strategis dengan *stakeholders*.
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan *Good Governance*.
10. Memperkuat organisasi dan mengembangkan SDM yang berkompentensi tinggi dengan dukungan budaya kerja yang berbasis pengetahuan.

3.3 Tugas & Produk Pokok KPwDN BI Prov. Jabar

- a. Melaksanakan fungsi *advisory* kebijakan kepada Kepala Daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
- b. Melaksanakan fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS) dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan.

- c. Melaksanakan fungsi statistik ekonomi dan keuangan daerah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan/atau kebijakan di kantor pusat maupun daerah.
- d. Melaksanakan fungsi PUR meliputi perencanaan, pendistribusian dan pengolahan uang, serta layanan kas.
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan SP dan PUR.
- f. Melaksanakan fungsi SP.
- g. Melaksanakan fungsi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Keuangan Inklusif (KI).
- h. Melaksanakan dan mengelola fungsi *enabler* (pendukung).
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas ke Departemen Regional, serta *monitoring* dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten (KPwDN Kota/Kab) di bawahnya

3.4 Struktur Organisasi KPwDN Provinsi Jawa Barat



Gambar 3.3 Struktur Organisasi (OSBI KPw BI Jabar, Oktober 2016)

KPwDN BI Provinsi Jawa Barat memiliki struktur organisasi seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas. Berikut adalah beberapa tugas & produk pokok dari setiap bagian nya:

I. Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi

A. Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan

1. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan

Tabel 3.1 Tugas & Produk Tim Statistik

Tugas Pokok	Produk Pokok
Menyusun <i>Regional Financial Account</i> dan/atau <i>Regional Balance Sheet</i> (RFA dan/atau RBS).	RFA dan/atau RBS.
Mengumpulkan informasi, mengolah dan menyusun statistik ekonomi dan keuangan daerah untuk kebutuhan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal.	Buku SEKDA; Data olahan (a.l. moneter, stabilitas sistem keuangan, SP dan PUR).
Melaksanakan survei dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi <i>advisory</i> .	Statistik dan/atau laporan hasil survei.

2. Fungsi Asesmen Ekonomi dan *Surveillance*

Tabel 3.2 Tugas & Produk Tim Asesmen

Tugas Pokok	Produk Pokok
Melakukan pengumpulan informasi ekonomi strategis serta asesmen ekonomi dan keuangan untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.	Asesmen ekonomi daerah, a.l.: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi, Ringkasan Ekonomi Regional (RER), Laporan Analisis Inflasi; Kajian bersama dengan Satuan Kerja Kantor Pusat dan/atau Departemen Regional; <i>Analytical notes/occasional paper</i> dan/atau kajian isu strategis.
Menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dan kajian.	Rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah kepada Kepala Daerah (<i>advisory</i>).
Menyusun proyeksi makroekonomi daerah.	Hasil proyeksi dan asumsi makroekonomi daerah.

B. Divisi Pengembangan Ekonomi

1. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan

Tabel 3.3 Tugas & Produk Fungsi Koordinasi & Komunikasi Kebijakan

Tugas Pokok	Produk Pokok
Melaksanakan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam rangka pengendalian inflasi dalam wilayah kerja dan/atau antar wilayah kerja	Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi (a.l. <i>high level meeting</i> , rapat teknis, rapat koordinasi dalam wilayah kerja, dan kegiatan lain terkait pengendalian inflasi).
Menyusun dan melaksanakan program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya, termasuk melakukan penyesuaian terhadap materi/publikasi eksternal sesuai	a. Rencana kegiatan; b. Laporan pelaksanaan program komunikasi dan materi komunikasi di daerah (a.l. <i>media briefing, focus group</i>

dengan kebutuhan daerah.	<i>discussion, seminar dan talkshow</i>).
Mengelola pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), termasuk beasiswa.	Usulan dan strategi pelaksanaan PSBI; Laporan pelaksanaan PSBI, termasuk beasiswa.
Melaksanakan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang.	Pelaksanaan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang.

2. Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

Tabel 3.4 Tugas & Produk Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

Tugas Pokok	Produk Pokok
Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi.	Kajian dan rekomendasi dalam rangka mendorong pengembangan UMKM; Terlaksananya kegiatan bantuan teknis (penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan/atau fasilitas); Implementasi program pengembangan UMKM (a.l. pengembangan komoditi strategis, program pengembangan ekonomi berbasis komunitas, <i>Local Economic Development (LED), Value Chain Financing</i> , Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah/PPKD, <i>credit rating</i>).
Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM a.l. melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitasi program pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Terlaksananya fasilitasi upaya peningkatan akses UMKM kepada perbankan (a.l. melalui penyusunan <i>lending model, Value Chain Financing</i> , PPKD, <i>credit rating</i>).

Tugas Pokok	Produk Pokok
Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan UMKM.	Penyediaan informasi terkait UMKM (a.l. data profil UMKM, data hasil kajian Komoditas Produk Jenis Usaha Unggulan/KPJU UMKM dan <i>lending model</i>).

II. Grup SP, PUR, Layanan dan Administrasi

A. Divisi SP dan PUR

1. Tim PUR dan Operasional SP

a. Unit Distribusi Uang

Tabel 3.5 Tugas & Produk Unit Distribusi Uang

Tugas Pokok	Produk Pokok
Melaksanakan distribusi uang.	a. Distribusi uang (a.l. pengiriman uang) di wilayah kerjanya; b. Penerimaan/persediaan uang; c. Pengiriman uang kas titipan; d. Pengambilan uang kas titipan.
Melakukan pengelolaan khasanah.	a. Modal kerja harian; b. Pengambilan dan pengembalian uang ke khasanah; c. Pengelolaan barang titipan pada khasanah.
Menyusun Rencana Distribusi Uang (RDU).	RDU mengacu pada Estimasi Kebutuhan Uang (EKU).

b. Unit Layanan dan Administrasi

Tabel 3.6 Tugas & Produk Unit Layanan & Administrasi

Tugas Pokok	Produk Pokok
Melakukan pembukuan transaksi layanan kas.	Warkat pembukuan transaksi layanan kas.
<p>Melakukan administrasi dan analisis upal, termasuk yang dilakukan di laboratorium upal :</p> <p>a. Klarifikasi keaslian uang Rupiah dari perbankan, masyarakat, dan aparat penegak hukum (kejaksaan, POLRI);</p> <p>Analisis dan tata usaha upal (a.l. melalui <i>BI Counterfeit Analysis Center/BI-CAC</i>);</p> <p>Pemberian keterangan ahli terkait dengan keaslian uang Rupiah.</p>	<p>Klarifikasi keaslian uang Rupiah;</p> <p>Hasil analisis yang diinput ke database upal pada BI- CAC;</p> <p>Keterangan ahli.</p>
Melaksanakan pelayanan kas.	<p>Layanan penarikan bank;</p> <p>Layanan penyetoran bank;</p> <p>Layanan penukaran uang;</p> <p>Layanan kas luar kantor;</p> <p>Layanan penarikan dan penyetoran non bank (a.l. setoran dan penarikan intern, pajak);</p> <p>Administrasi penyetoran dan penarikan bank peserta kas titipan;</p> <p>Layanan penjualan uang Rupiah khusus kepada masyarakat;</p> <p>Pengelolaan data PUR.</p>

c. Unit Pengolahan Uang

Tabel 3.7 Tugas & Produk Unit Pengelolaan Uang

Tugas Pokok	Produk Pokok
Melakukan perencanaan modal kerja dan melaksanakan kegiatan pengolahan uang.	Rencana dan pelaksanaan kegiatan pengolahan uang: Sortasi dan hitung ulang manual; Sortasi uang dengan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK); Pemusnahan uang dengan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK).
Melakukan pemeliharaan peralatan pengolahan uang dan memantau persediaan supplies. (a.l. Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK) dan Mesin Hitung Uang Logam (MHUL), MSUK, MRUK).	Kesiapan mesin untuk pengolahan uang; Laporan pemeliharaan peralatan pengolahan uang secara periodik, termasuk laporan <i>downtime</i> ; Laporan penggunaan peralatan pengolahan uang secara periodik; Ketersediaan supplies (perlengkapan operasional) kas.

d. Unit Operasional dan Sistem Pembayaran

Tabel 3.8 Tugas & Produk Unit Operasional & Sistem Pembayaran

Tugas Pokok	Produk Pokok
Melakukan penatausahaan dan pengelolaan administrasi SP.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan administrasi SP antara lain Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-

Tugas Pokok	Produk Pokok
	RTGS), Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS), Bank Indonesia <i>Electronic Trading Platform</i> (BI-ETP) serta Bank Indonesia Sentralisasi Otomasi Sistem Akuntansi (BI-SOSA).
Melakukan fasilitasi pertukaran warkat debit (Koordinator Pertukaran Warkat Debet/KPWD).	Fasilitasi pertukaran warkat debit dan kliring pengembalian debit.
Mengelola <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) SP	Laporan pelaksanaan BCP termasuk tersedianya layanan <i>guest bank</i> *) (a.l. SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP).

2. Tim Pengawasan SP, PUR dan KI

a. Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR

Tabel 3.9 Tugas & Produk Fungsi Perizinan & Pengawasan SP, PUR & KI

Tugas Pokok	Produk Pokok
Melaksanakan perizinan (pembukaan, perpanjangan, dan pencabutan) Kegiatan Layanan Uang (KLU).	Izin Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD); Izin pembawaan Uang Kertas Asing (UKA); Izin KPWD non BI.
Melaksanakan pengawasan KLU.	Laporan Hasil Pengawasan KUPVA BB dan PTD; Laporan pengawasan pembawaan UKA; Laporan KPWD; Laporan pengawasan kewajiban penggunaan uang Rupiah.

Tugas Pokok	Produk Pokok
Memberikan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/penutupan, serta melaksanakan pengawasan kas titipan.	Rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/penutupan kas titipan; Laporan pengawasan kas titipan.

b. Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen

Tabel 3.10 Tugas & Produk Fungsi Analisis SP, PUR KI & Perlindungan Konsumen

Tugas Pokok	Produk Pokok
Merencanakan dan melaksanakan program KI.	Rencana dan laporan pelaksanaan program KI (a.l. elektronifikasi).
Menghitung EKU.	Hasil survei kebutuhan dan preferensi uang; Usulan EKU kepada Kantor Pusat; Evaluasi kecukupan kas; Statistik pengelolaan uang.
Mengelola data dan informasi SP dan PUR serta KI.	Data dan informasi SP dan PUR, serta KI.

B. Satuan Layanan dan Administrasi

1. Fungsi SDM, Logistik, Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan

Tabel 3.11 Tugas & Produk Fungsi SDM, Logistik, Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan

Tugas Pokok	Produk Pokok
--------------------	---------------------

Melakukan administrasi data dan informasi SDM di satuan kerja.	Layanan dan administrasi gaji serta penghasilan pegawai; Layanan dan administrasi manfaat serta fasilitas pegawai dan keluarga pegawai (a.l. fasilitas kesehatan, peringatan masa pengabdian); Administrasi kehadiran dan data kepegawaian;
Mengelola SDM non- organik.	Pelaksanaan pengelolaan SDM non- organik: penerimaan, penempatan, pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja serta pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan berlaku.
Melakukan fungsi Pelaksana Anggaran (PA) dan administrasi pajak satuan kerja	WRA dan laporan realisasi anggaran satuan kerja; Administrasi perpajakan.

Selain itu terdapat dua fungsi pendukung lainnya di KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. ICO (*Internal Control Officer*) yang memiliki fungsi:

- a. Bertanggung jawab me-*review* dan mengkoordinasikan profil risiko satker dan KPwDN di bawahnya.
- b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan rencana pemantauan pengendalian intern satker dan KPwDN di bawahnya.
- c. Bertanggung jawab me-*review* hasil pemantauan pengendalian intern satuan kerja dan KPwDN di bawahnya, dll.

2. PM (*Performance Management*), fungsi :

- a. Bertanggung jawab menyusun usulan/ perubahan/penyesuaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja serta mengkoordinasikan penyusunan, *monitoring* dan evaluasi Program Kerja, Anggaran dan Rencana Investasi (PKARI) KPwDN beserta penjelasannya.
- b. Bertanggung jawab mendukung penyusunan bahan Evaluasi Kinerja Bulanan (EKB) yang meliputi *monitoring*, *updating*, koordinasi & evaluasi pencapaian kinerja serta program kerja dan anggaran KPwDN (beserta KPwDN Kota di wilayah kerjanya).
- c. Bertanggung jawab menjalankan analisis dan koordinasi untuk mengakslerasi dan *debottlenecking* permasalahan terkait pencapaian kinerja KPwDN

BAB IV

Pembahasan

4.1 Alur Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Divisi/Tim/Unit	Januari 2017											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Asesmen Ekonomi & Keuangan												
Sistem Layanan Administrasi												
Unit Sistem Layanan Administrasi												
Unit Logistik												
Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah												
Kliring & Akunting												
Pengelolaan Uang Rupiah												
Pengawasan Sistem Pembayaran & Non Tunai												
Pengembangan Ekonomi												
Laporan Kegiatan Magang												

Keterangan: Hari Kerja dan Hari Libur

Praktik kerja lapangan dimulai dari tanggal 16 Januari 2017, diawali dari Divisi Asesmen Ekonomi & Keuangan selama 2 hari. Kemudian tanggal 18 Januari 2017, di tempatkan di Satuan Layanan Administrasi juga berlangsung selama 2 hari. Jumat, 20 Januari 2017 berpindah ke Divisi Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah khususnya di divisi Kliring & Akunting. Senin, 23 Januari pembekalan materi dari unit Pengelolaan Uang

Rupiah. Hari berikutnya, dari Unit Pengawasan Sistem Pembayaran & Non-Tunai. Rabu, 25 Januari 2017 adalah pembekalan terakhir dari Divisi Pengembangan Ekonomi. 2 hari terakhir (26 -27 Januari 2017) tidak ada pembekalan materi namun hanya diisi dengan pengerjaan laporan magang.

4.2.1 Divisi Advisory Ekonomi & Keuangan

1. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Mempunyai tugas yang dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

a. Membuat Kajian/Asesmen Ekonomi

Meliputi Inflasi, *Gross Domestic Product*, Ekspor & Impor, Gambaran Fiskal, Gambaran dari sisi Industri Pertanian, dll

b. Melihat Permasalahan Sektor Stabilitas Keuangan

Meliputi Kondisi Keuangan, Kondisi *Non Performing Loan*, dll.

Dalam menjalankan tugasnya, tim asesmen dan tim surveilans harus memperhatikan berbagai jenis inflasi yang diukur dengan Disagregasi Inflasi Indeks Harga Konsumen, yaitu:

i. Inflasi Inti (Core Inflation)

yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti, Interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal:

1. Nilai tukar,

2. Harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan
3. Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

ii. Inflasi non Inti

yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari:

a. Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*)

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Pembentukan harga berdasarkan kekuatan di pasar.

b. Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*)

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga yang diatur pemerintah, yang menyangkut hidup orang banyak seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Di sisi fiskal, memberi gambaran ke pemerintah bahwa pentingnya memperhatikan APBN/APBD karena jika pemerintah mengalami defisit tidak boleh melebihi 3% (batas max defisit 3%). Dikarenakan apabila pemerintah overspending maka ketika pemerintah ingin meminjam uang, di dalam Surat Utang Negara bunganya akan lebih

besar, serta dampak ke masyarakatnya pun akan memberatkan masyarakat dengan tingginya pajak yang dibebankan pada masyarakat, mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah di bidang fiskal.

Di sisi Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia diperlukan pengawasan terhadap korporasi. Ketika perusahaan ingin mencari pemasukan dana (melakukan pinjaman) dengan bunga terendah, maka perusahaan memiliki pilihan, yaitu pilihan pertama, pinjam uang ke bank dalam bentuk kredit, atau pilihan kedua, melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi, ataukah pilihan ketiga, melakukan utang luar negeri. Namun Bank Indonesia harus memperhatikan utang perusahaan ke luar negeri supaya tidak mengakibatkan rupiah melemah yang dapat berdampak pada ketidakstabilan sistem keuangan jika nilai dolar langka di dalam negeri untuk bayar utang perusahaan Indonesia ke luar negeri.

Di sisi rumah tangga, jenis-jenis kredit meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Bank Indonesia harus memperhatikan kredit konsumsi, karena kredit konsumsi merupakan kredit terbesar yang sangat mempengaruhi tingkat kolektibilitas (kualitas kredit) supaya NPL tidak tinggi, karena jika NPL tinggi maka kredit tersebut bermasalah sesuai urutan tingkat kolektibilitas dari 1 sampai 5.

Bank Indonesia dalam menentukan target inflasi, hal-hal yang diperhatikan:

- a. Proyeksi inflasi kedepannya (Bank Indonesia melakukan *Forward Inflation*)
- b. Pengeluaran pemerintah. Jika belanja pemerintah tinggi yang diiringi dengan banyaknya proyek pemerintah, maka pendapatan masyarakat naik, kemudian konsumsi naik, kemudian harga naik, ketika naiknya harga secara keseluruhan akan menurunkan daya beli masyarakat.
- c. Ekspor dan impor yang terkait neraca perdagangan
- d. Kurs

Proyek inflasi memiliki dua jenis, yaitu:

- a. *Adaptive Inflation* (melihat inflasi ke belakang)
- b. *Forward Inflation*, masyarakat harus mengikuti target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia.

2. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan

Mempunyai tugas yaitu meracik/mengelola data dari berbagai sumber dalam bentuk statistik, kemudian dianalisis oleh tim asesmen, setelah itu dibuat kajian oleh tim asesmen. Data dari tim ini disajikan untuk *stakeholder*. Tugas kedua yaitu melakukan publikasi rutin bulanan mengenai statistik ekonomi keuangan daerah (contoh statistik menyangkut kredit, tabungan, deposito di suatu daerah).

Tim Data dan Statistik Ekonomi melakukan berbagai survei yang secara keseluruhan survei bekerjasama dengan pihak ketiga untuk terjun langsung ke lapangan mengenai inflasi, meliputi:

1. Survei Harian dan Survei Mingguan mengenai suatu hal, kemudian memprediksikan dan membandingkan prediksi dengan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan berikutnya terkait inflasi. Contoh: Tim Data dan Statistik Ekonomi melakukan survei harga di bulan Januari mengenai kenaikan harga cabai, kemudian dibandingkan dengan data dari BPS di bulan berikutnya (februari).
2. Survei yang dilakukan setiap 1 bulan sekali atau bulanan meliputi:
 - a) Survei Penjualan Eceran: Harga barang retail seperti pakaian, makanan, elektronik, dll
 - b) Survei Konsumen: Mengenai bagaimana tingkat pengeluaran konsumen, ekspektasi konsumen terhadap harga kedepannya.
3. Survei yang dilakukan setiap 3 bulan sekali atau triwulan meliputi:
 - a) Survei Kegiatan Dunia Usaha
Bagaimana kondisi dunia usaha di pabrik, korporasi, pengusaha, dll
 - b) Survei Properti, antara lain: Properti Komersial: Perhotelan, kantor, apartemen, lahan/industri; Properti Residensial: Perumahan Residensial Primer: Rumah baru; Residensial Sekunder: Rumah bekas.

4. Survei Insidental: Survei tidak rutin.

4.2.2 Kegiatan di Divisi *Advisory* Ekonomi Keuangan

1. Tim Asesmen dan Survey

Praktik kerja lapangan yang kami lakukan di Bank Indonesia KPW Jabar pada hari Senin, 16 Januari 2017 kami memiliki jadwal di Divisi *Advisory* Ekonomi Keuangan, yang sesi pertama diberikan materi oleh Bapak Wahyu mengenai tugas divisi tersebut serta hal-hal yang terkait. Kemudian kami diberikan tugas kelompok (terdiri dari 5 orang) untuk melakukan kajian dengan tema pangan, kami memutuskan untuk mengkaji mengenai kenaikan harga cabai rawit merah yang cukup signifikan terjadi di masyarakat Indonesia di beberapa bulan terakhir. Tugas yang diberikan dengan tujuan untuk melatih kami untuk bisa berpikir secara kritis (*Critical Thinking*) dan dengan batas pengumpulan makalah 1 hari setelah pemberian tugas (deadline tugas Selasa, 17 Januari 2017).

2. Tim Data dan Statistik Ekonomi

Di sesi kedua, kami hanya diberikan paparan materi mengenai tugas yang dilakukan tim ini dan hal-hal yang terkait. Kami mendapatkan referensi website/situs untuk mengakses mengenai tingkat harga dan perubahan harga dalam statistik. Situsnya tersebut, yaitu: *Priangan.org* dan *hargapangan.id*

4.3 Satuan Layanan dan Administrasi

Menurut struktur organisasi, garis komando SLA kepada Kepala Grup SP, PUR, Layanan, dan Administrasi. Dalam satuan ini terdapat 4 fungsi yang terdiri dari:

a. Fungsi SDM

Tugas pokok fungsi SDM di KPw BI Provinsi Jabar sebagai berikut:

- Melakukan administrasi data dan informasi SDM di satuan kerja
- Mengelola SDM non-organik

b. Fungsi Logistik

Melakukan perencanaan, pemenuhan, penatausahaan dan pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor, alat tulis kantor (ATK) satuan kerja

c. Fungsi Anggaran

Tugas pokok fungsi anggaran di KPw BI Provinsi Jabar sebagai berikut:

- Melakukan fungsi Pelaksana Anggaran (PA) dan administrasi pajak satuan kerja
- Mengelola penghitungan, koreksi, penyetoran dan pelaporan pajak KPw BI Jawa Barat

d. Fungsi Sekretariat

- Mengelola administrasi perjalanan dinas satuan kerja
- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan satuan kerja

e. Fungsi Protokol & Pengamanan

- Mengelola kegiatan protokoler

- Menyediakan akomodasi, transportasi, perizinan, sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan keprotokolan di wilayah kerjanya
- Melaksanakan kegiatan operasional pengamanan personil, materil, lingkungan dan acara kedinasan yang diselenggarakan oleh pihak internal dan/atau eksternal, di wilayah kerjanya
- Melaksanakan pengelolaan peralatan pengamanan di wilayah kerjanya

4.3.1 Kegiatan selama di SLA

Hari ketiga, kami diberikan pengarahan materi tentang struktur organisasi beserta tugas & produk pokoknya masing-masing yang berlaku di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Pembekalan materi tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Endang & Ibu Ririn dari Tim SDM. Hari keempat, kami diberikan pembekalan materi tentang tugas & produk pokok secara umum mengenai Satuan Layanan dan Administrasi.

4.4 Operasional Sistem Pembayaran

A. Prosedur Pelaksanaan Kliring

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai Pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI.

Penyelenggaraan kliring oleh BI diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI).

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment System* (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (retail) yaitu transaksi di bawah Rp 100 juta.

Adapun untuk penyelenggara SKNBI terbagi menjadi :

1. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)

PKN bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) c.q Bagian Penyelenggaraan Setelmen yang bertempat di Gd. D BI, Jl. MH.Thamrin No. 2 Jakarta Pusat.

2. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)

PKL bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring lokal. Berdasarkan pihak yang menjadi penyelenggara, PKL dibedakan menjadi 2, yaitu PKL BI dan PKL Selain BI.

PKL BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh BI yaitu Kantor Bank Indonesia dan Bagian Kliring Jakarta yang berada di Kantor Pusat Bank Indonesia. Sedangkan PKL Selain BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh kantor bank yang telah mendapat persetujuan dari BI untuk menyelenggarakan SKNBI di wilayah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan SKNBI di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor BI pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan tertulis dari bank-bank setempat.

Persyaratan minimal agar di suatu wilayah dapat diselenggarakan SKNBI adalah :

1. Jumlah Kantor Bank

Jumlah kantor bank yang mendukung dan akan menjadi peserta penyelenggaraan SKNBI paling kurang empat bank yang berbeda.

2. Jumlah Transaksi

Jumlah warkat debit antar bank setempat yang potensial untuk dikliringkan melalui Kliring debit rata-rata paling kurang 30 (tiga puluh) warkat per hari dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.

3. Persyaratan menjadi peserta SKNBI :

Untuk menjadi peserta SKNBI, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pihak yang dapat menjadi peserta SKNBI adalah Bank. Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari BI.
2. Lokasi kantor bank memungkinkan untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan PKL.
3. Telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara BI dengan bank sebagai peserta.
4. Kantor Bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik utama maupun backup.

4. Jam Operasional SKNBI

a) Kliring Kredit

1. Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Kredit ditetapkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
2. Kegiatan operasional Penyelenggaraan Kliring Kredit dimulai pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

b) Kliring Debet

- a. Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Debet ditetapkan secara lokal per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- b. Seluruh kegiatan kliring debet, yaitu Kliring Penyerahan dan Pengembalian diselesaikan pada hari yang sama kecuali untuk wilayah kliring Jakarta dan Surabaya, kegiatan kliring pengembalian dilakukan pada keesokan harinya atau H+1.
- c. Batas waktu operasional penyelenggaraan kliring debet ditetapkan oleh PKN yaitu pukul 15.30 WIB.

4.4.1 Kegiatan Selama di Operasional SP

Tim Operasional SP di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bandung dipimpin oleh Bapak Ambar serta beberapa staff lainnya Bapak Toyo, Bapak Sarkosih dan Ibu Reni. Kami menuju operasional SP pada Jumat, 20 Januari 2017 pukul 7 pagi. Saat tiba di ruangan kami diberikan sosialisasi tentang kliring dan alat-alat kliring berupa Cek, Bilyet Giro (BG) serta Nota Debet. Dalam rentang waktu pukul 10.00 – 12.00 WIB merupakan waktu pengembalian setelah adanya perhitungan warkat-warkat oleh divisi kliring ini serta revisi nomer-nomer yang tidak bisa terdeteksi oleh mesin kliring. Kami sempat diperbolehkan untuk melihat proses mesin penghitung & pembaca warkat (*Reader Sorter*). Mesin

tersebut guna memudahkan dalam pemisahan Cek, BG, dan Nota Debet dalam perhitungan serta menghemat waktu dalam perhitungan warkat disbanding secara manual. Proses dari mesin tersebut ialah:

1. BPWD (Bukti Penyerahan Warkat Debet) dimasukan ke mesin PIS (*Payin Slip*)
2. Warkat dimasukan ke mesin RS (*Reader Sorter*) dan semua disesuaikan oleh computer dari kode bank masing-masing, di dalam putaran pertama, warkat yang dihitung ialah 1-20 bank setelah itu putaran kedua ialah 21-40 bank.

Sebenarnya di dalam mesin RS terdapat 23 Slot bank namun di slot 21,22, dan 23 merupakan slot yang hanya menerima daftar kode bank yang tidak tercantum didalam putaran pertama yaitu 1-20 bank, lalu putaran kedua ialah memasukan dari slot 21-23 yang di putaran pertama ditolak/direject.

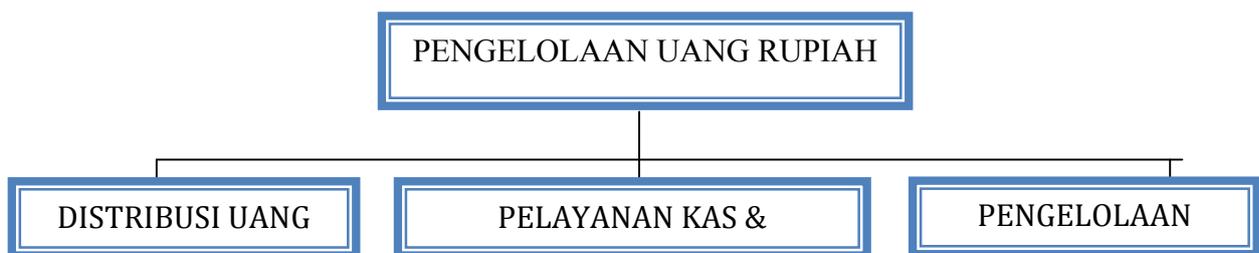
Setelah itu dari mesin RS digabungkan dan disatukan di tiap-tiap bank sesuai urutan kode bank yang tercantum dan dimasukan kedalam tas khusus berwarna merah dan bertulisan nama bank di tas tersebut lalu setelah itu diberikan kepada perwakilan dari bank untuk mengambil kliring.

Di dalam divisi ini kami diperbolehkan untuk merevisi tiap-tiap BPWD yang salah dan tidak sama datanya setelah di cek oleh mesin PIS. Setelah itu karena waktu yang berdempetan untuk ibadah solat Jumat, kliring pun selesai dalam hal pengembalian. Setelah itu dimulai proses penyerahan

warkat oleh perwakilan tiap-tiap bank. Dimulainya pada pukul 14.00 hingga 16.00 kami hanya diperbolehkan untuk meletakkan tas-tas tersebut ke loker yang sesuai tiap-tiap bank. Setelah itu semua dilakukan hingga penutupan penyerahan kliring, dilanjut dengan sosialisasi lagi dan sesi tanya jawab mengenai kliring hingga pukul 17.00.

4.5 Sistem Pengelolaan Uang Rupiah Tunai

Tabel 4.2 Struktur Sistem Pengelolaan Uang Rupiah



a. Distribusi Uang

Tugas utama distribusi uang adalah merencanakan, menghitung dan menjaga ketersediaan uang yang ada di suatu wilayah sehingga ketersediaan uang dapat terpenuhi dengan baik di setiap sub wilayah tersebut.

Merencanakan dan menghitung ketersediaan uang dilakukan setiap tahunnya dengan melihat beberapa faktor seperti kondisi ekonomi suatu wilayah, proyeksi 2 – 3 tahun sebelumnya. Dalam menjaga ketersediaan uang yang ada di suatu wilayah, setiap KPw mempunyai gudang penyimpanan barang-barang berharga (Khazanah) ada kas besar dan kas

harian. Dimana KPw Prov. Jawa Barat mempunyai Khazanah terbesar ke-2 setelah Pusat (Jakarta). Dalam menjaga ketersediaan kas di KPw Prov. JaBar mewajibkan simpanan kas minimum sebesar 1.5 kali dari pengeluarannya (*outflow*).

Contohnya : Wilayah Jawa Barat khususnya Bandung merupakan salah satu karakteristik *inflow* yaitu pendapatan yang masuk ke suatu daerah lebih banyak dari pengeluarannya. Karena di wilayah jawa barat banyak destinasi wisata yang membuat jawabar mempunyai karakteristik *inflow*.

b. Pelayanan Kas & Administrasi

Tugas utama dari Pelayanan Kas dan Administrasi;

1. Melakukan penyediaan setoran bayaran bank

Setoran bayaran bank adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank-bank umum di provinsi jawa barat untuk melaporkan kondisi likuiditas keuangannya setiap hari, dengan menggunakan aplikasi BISIL (Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan).

Kondisi likuiditas keuangan:

- a. *Long* : kondisi kelebihan likuiditas
- b. Kondisi likuiditas tetap
- c. *Short* : Kondisi kekurangan likuiditas

Mekanisme pelaporan likuiditas harian suatu bank:

- a. Pada pukul 06.00-08.00 WIB bank – bank umum melaporkan kondisi likuiditas keuangannya kepada Bank Indonesia KPw nya

- b. Pada pukul 08.00-15.00 WIB bank – bank umum melakukan kegiatan operasional mereka. Dimana pada saat kegiatan ini mereka bisa saja melakukan kegiatan Tansaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAP) untuk dapat memenuhi kebutuhan likuiditas mereka yang dapat dilihat melalui sistem BISIL tersebut.
- c. Pada pukul 16.00-17.00 WIB bank- bank umum melaporkan kondisi likuiditas keuangannya kepada Bank Indonesia KPw nya. Hasil akhir ini jika kondisi bank dalam keadaan short atau kekurangan likuiditas, bank umum tersebut dapat meminta dana kepada bank umum lainnya atau dapat meminta Bank Indonesia KPw nya untuk dapat membantu memenuhi likuiditas mereka dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

2. Penukaran

Penukaran uang yang dilakukan seperti penukaran uang lusuh, penukaran uang kecil, dan penukaran uang interen. Penukaran uang ini juga merupakan salah satu kegiatan pemenuhan keadaan likuiditas uang di suatu bank yang ditujukan untuk pemenuhan permintaan nasabah atau masyarakat.

Penukaran uang yang dilakukan oleh masyarakat dapat langsung mendatangi bank-bank umum yang ada di sekitarnya atau BI juga menyediakan kas keliling untuk membantu daerah-daerah yang sangat terpencil untuk melakukan penukaran uang.

3. Penanggulangan uang palsu

Penanggulangan uang palsu Bank Indonesia berkerja sama dengan Badan Intelejen Negara (BIN), Porli, Kejaksaan Agung, dan Kementrian Keuangan. Dalam penangulangan uang palsu Bank Indonesia juga melakukan edukasi kepada masyarakat luas agar dapat membantu memberantas kegiatan uang palsu dengan cara melaporkan ke pihak bank umum terdekat atau kepada polisi dan berkoordinasi dengan para aparat dalam menangkap dan membuat efek jera kepada pelaku pemalsuan uang tersebut dan dibantu juga data based yang dimiliki oleh bank indonesia terkaait kegiatan pemalsuan uang.

Mekanisme alur pelaporan uang palsu:

Masyarakat → bank umum (perbankan → kepolisian → Bank Indonesia

Yang dapat menyatakan keaslian sebuah uang hanyalan Bank Indonesia. Sehingga dalam penyelidikan pegawai Bank Indonesia yang telah lulus setrifikasi dapat menjadi saksi ahli dalam persidangan.

4. Pengelolaan kas titipan

Kas titipan merupakan kegiatan bank indonesia untuk mempermudah masyarakat yang jauh dari Bank Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan likuiditas uang disuatu daerah. Seperti Bank

Indonesia menunjuk Bank Jabar menjadi kas titipan di wilayah Sukabumi. Syarat pembukaan kas titipan;

- d. Jarak yang cukup jauh
- e. Jumlah bank yang banyak
- f. Kegiatan ekonomi yang tinggi

Syarat pemilihan bank untuk menjadi kas titipan;

- g. Kapasitas Khazanah yang memadai
- h. Keamanan yang baik
- i. Kesepakatan BMPD

5. Administrasi

Pelaporan semua kegiatan yang ada di pengelolaan uang rupiah

c. Pengelolaan Uang

Secara garis besar dalam divisi kas, pengelolaan uang bank indonesia hanya melakukan kegiatan pengelolaan dan penghitungan uang. Dengan alur bisnis :

1. Bank umum menyerahkan uang yang mereka setor ke Bank Indonesia / Bank Indonesia Kantor Perwakilannya
2. Setelah sampai di BI, BI melakukan penghitungan ulang yang dilakukan dengan menggunakan mesin yaitu ada mesin uang kertas (MESUK) dan hitung ulang manual (HUM) untuk memastikan bahwa jumlah yang diserahkan dan diterima oleh BI adalah sama. Orang yang menyerahkan dan mewakili bank umum tersebut juga

harus dengan persyaratan bahwa orang tersebut sudah masuk dalam daftar Bank Indonesia.

3. Setelah penghitungan selesai sambil berjalan akan dipisahkan antara uang layak edar (ULE) dengan uang tidak layak edar (UTLE) dimana uang yang tidak layak edar ini seperti uang lusuh, uang bolong, uang sobek dan uang palsu yang secara otomatis UTLE ini akan masuk kedalam tahap peracikan uang, yaitu uang tidak layak edar akan dihancurkan. Dengan mesin racik uang kertas (MERUK)
4. Setelah proses 2 dan 3 yang dilakukan di khazanah bank indonesia, selanjutnya bagian pengelolaan khazanah melaporkan hasil perhitungan kepada kepala kasir bank indonesia tersebut dan juga pelaporan kepada bank umum yang terkait.

Menurut Undang-Undang Mata Uang no 7 tahun 2011, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi tahapan:

d. Perencanaan

Bank Indonesia melakukan Perencanaan dan penentuan jumlah Uang Rupiah yang dicetak dengan memperhatikan antara lain asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan Uang Rupiah, serta perkiraan jumlah Uang Rupiah yang dimusnahkan. Dan Bank Indonesia menyediakan jumlah Uang Rupiah yang akan diedarkan.

e. Pencetakan

Bank Indonesia melakukan pencetakan Uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah. Yaitu bank indonesia menunjuk PERUMPERURI dengan berbagai syarat yang telah ditentukan.

f. Pengeluaran

Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tanggal emisi yang tercetak di mata uang)

g. Pengedaran

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengedarkan uang ruppiah di Indonesia, pengedaran mata uang rupiah di bantu oleh berbagai pihak perbankan dan menggunakan kas keliling.

h. Pencabutan dan Penarikan

Bank Indonesia melakukan pencabutandan penarikan uang dengan kategori uang-uang yang sudah lusuh, sudah banyak pemalsuannya, dan faktor-faktor lainnya. Bank indonesia dibantu dengan perbankan menarik dan mencabut mata uang dari masyarakat dengan ketentuan masa penukaran selama 10 tahun, yaitu 5 tahun pertama mata uang yang dicabut dapat ditukarkan di bank umum maupun di BI, 5 tahun ke dua penukaran hanya dapat dilakukan di BI

i. Pemusnahan Uang Rupiah

Pemusnahan uang rupiah dilakukan di bank indonesia ini adalah uang-uang UTLE atau uang tidak layak edar seperti uang bolong, uang lusuh, uang sobek (minimal 2/3 dari uang asli), dan uang palsu. Uang yang dimusnahkan akan di hitung dan akan digantikan dengan uang baru atau uang yang layak edar.

Seluruh kegiatan 6 tahapan ini dilakukan oleh seluruh Bank Indonesia dipusat maupun di kantor perwakilan setiap daerah.

4.5.1 Kegiatan saat di PUR

Kami diberikan pembekalan materi mengenai isu-isu yang terkait dengan pengeluaran mata uang baru:

1. PALU ARIT

Dalam menanggapi isu terkait palu arit bank indonesia langsung melakukan klarifikasi bahwa, saat ini Bank Indonesia ingin meminimalisir sekaligus mencegah terjadinya pemalsuan uang, maka dengan itu bank indonesia dalam merancang uang menggunakan metode *rectoverso* yaitu penggabungan logo Bank Indonesia yang dapat terlihat jelas dengan cara diterawang. Yang sebenarnya metode ini telah digunakan cukup lama pertama kali adalah di mata unag Rp. 1000 rupiah, tetapi *rectoverso* yang dihasilkan tidak terlalu mencolok seperti saat ini



Gambar 4.1 Rectoverso di lembaran 1000 dan 100.000

(sumber: google.com)

2. CUT MEUTIA

Isu cut meutia tidak menggunakan jilbab pada mata uang Rp. 1000 tahun emisi 2016, secara harfiah Bank Indonesia dalam merancang mata uang baru atau membuat mata uang tidak sertamerta dapat langsung saja memilih pahlawan dan langsung mencetak mata uang tersebut, secara aturan bank indonesia bekerjasama dengan pemerintah dalam pemilihan pahlawan yang akan menjadi gambar sebuah mata uang, selanjutnya Bank Indonesia juga berekerja sama dengan sejarahwan dalam mengambil gambar yang telah ada dalam buku pahlawan setelah itu melakukan persetujuan dari para ahli waris keluarga pahlawan. Setelah ahli waris menyetujui setelah itu baru mencetak mata uang tersebut. Jadi Bank Indonesia tidak sembarangan atau asal dalam pembuatan mata uang.



Gambar 4.2 Isu Palu Arit

(sumber: google.com)

3. MIRIP MATA UANG NEGARA LAIN (TIONGKOK)

Isu lainnya terkait dengan kemiripan dengan mata uang negara lain (Tiongkok). Dalam pemilihan bahan, warna, pahlawan, gambar dan sebagainya bank indonesia telah berkerjasama dengan pemerintah, dan bank indoensia melakukan banchmarking dengan negara lain yaitu indonesia melihat beberapa negara yang ada di eropa. Masalah warna atau kontras warna setiap mata uang harus mempunyai warna yang mencolok agar apat dengan cepat membedakan berbagai mata uang yang ada di indonesia



Gambar 4.3 Rupiah cetakan terbaru

(sumber: google.com)

4. PENCETAKAN UANG BARU MENYEBABKAN INFLASI

Tidak benar bahwa pencetakan uang baru menyebabkan inflasi bahwasannya uang yang telah dihancurkan atau di racik akan dicetak kembali sesuai dengan jumlah uang yang dihancurkan jadi tidak benar bahwa uang baru menyebabkan inflasi.

5. PENCETAKAN UANG YANG DILAKUKAN LEMBAGA SELAIN PERURI

Menurut perundang-undangan mata uang no 7 tahun 2011 bahwa bank indonesia hanya berkerjasama dengan lembaga BUMN dalam pencetakan mata uang yaitu lembaga Perum PERURI dimana hanya lembaga inilah yang sanggup atau menyanggupi permintaan bank indonesia dalam pencetakan uang yang ada di indonesia. Dan jika ada pun lembaga lain yang mencetak selain perumperuri itu juga ada dalam peraturan perundang-undangan mata uang dan dengan persyaratan yang sulit pula.

Menurut undang-undang mata uang no 7 tahun 2011 pasal 10, bahwa

- (1) Bank Indonesia melakukan pencetakan Uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah.
- (2) Penunjukkan badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengadaan jasa pencetakan Uang Rupiah di Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah, maka badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Pencetakan Uang Rupiah dengan memenuhi

persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya antara badan usaha milik negara dan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “tidak sanggup melaksanakan pencetakan Uang Rupiah” adalah ketidaksanggupan yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) dan bencana sosial, seperti bencana alam, pemogokan, atau terjadinya suatu kondisi yang menyebabkan akan tidak terpenuhinya kewajiban pencetakan Uang Rupiah sehingga dapat mengganggu persediaan Uang Rupiah. Yang dimaksud dengan “persyaratan pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya antara Bank Indonesia dengan badan usaha milik negara” antara lain persyaratan spesifikasi, harga, volume, dan jadwal.

- (4) Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara, dan harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan lain dalam rangka menjaga ketersediaan Uang Rupiah. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain Bank Indonesia

dapat mensyaratkan cara pengadaan tertentu dalam penunjukkan lembaga lain. Sistem Pembayaran Tunai Pengelolaan Uang Rupiah 7 Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

- (6) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk Bank Indonesia.

4.6 Tim Pengawasan SP, PUR dan Keuangan Inklusif

Secara strukturisasi, Tim Pengawasan SP, PUR dan KI berada dibawah divisi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Misi Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran ialah sistem pembayaran yg aman, efisien, lancar dan andal dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen. Kewenangan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dan uang rupiah terdiri dari:

1) Pengaturan (*Regulator*)

Pengaturan Sistem Pembayaran mempunyai cakupan pada Instrumen, Kelembagaan, Mekanisme dan Infrastruktur. Bank Indonesia menerapkan harus adanya unsur interepobilitas dalam mekanisme sistem pembayaran. Interpobilitas adalah kemampuan untuk dapat saling berinteraksi serta bekerjasama.

2) Pengawasan

3) Pengembangan

4) Perizinan

5) Penjatuhan Sanksi

Tim Pengawasan SP, PUR dan KI mempunyai dua fungsi yaitu, Fungsi Perizinan dan Pengawasan PUR dan Fungsi Analisis SP, PUR, KI dan Perlindungan Konsumen.

4.6.1 Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP & PUR

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ialah:

- 1) Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang SP, PUR dan KLU
- 2) Memastikan penyelenggaraan SP dilakukan secara lancar, aman, efisien dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen dan kepentingan nasional serta mengacu pada peraturan perundang-undangan
- 3) Memastikan pelaksanaan PUR oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh BI dilaksanakan secara aman dan akuntabel dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan kepentingan nasional, serta memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan BI.
- 4) Memastikan KLU dilakukan dengan tata kelola yang baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan

Objek Pengawasan:

- 1) Penyelenggaraan SP oleh BI

- 2) Kepesertaan SP BI
- 3) Penyelenggaraan SP oleh industri
- 4) Pihak-pihak yang berkerjasama dengan penyelenggara SP

Penyelenggara sarana pemroses transaksi pada KPwdn BI Jawa Barat terdapat lima fokus pengawasan yaitu,

1) Penyelenggaraan Transfer Dana

KPwdn Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap transfer dengan melihat apakah sistem transfer dana sudah cukup aman. Beberapa penyelenggara Transfer Dana di wilayah Jawa Barat ialah PT POS dan TELKOM

2) Koordinator pengelolaan dan pengawasan warkat debit di luar daerah (KPWD)

KPwdn BI Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap KPWD dengan melihat kepesertaan, prosedur, mekanisme dan KTPK (Kartu Tanda Peserta Kliring) yang ada pada KPWD tersebut. KPWD yang dibawah oleh KPwdn BI Jabar berada di Cianjur, Sukabumi, Subang, P uwakarta dan Garut. Daerah KPWD dipertimbangkan atas dasar akses dan kegiatan ekonomi yang ada pada daerah tersebut.

3) Kas Titipan

Untuk memenuhi kebutuhan uang tunai terutama di daerah terpencil, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan bank umum di

beberapa Provinsi di Indonesia untuk melakukan kegiatan kas titipan. Kas titipan yang ada dan diawasi oleh KPwdn BI Jabar berada di Sukabumi, yang dilakukan oleh Bank Jabar. Pengawasan Kas Titipan dilakukan dengan melihat keamanan, transaksi dan kelayakan tempat Kas Titipan tsb.

4) Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (JPUR)

KPwdn BI Jabar mengawasi perusahaan JPUR (PJPUR) yang berkaitan dengan KPwdn BI Jabar. Perusahaan JPUR ialah perusahaan yang biasanya bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk mengelola uang seperti pengiriman uang, pengisian ATM, dsb. PJPUR harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia berwenang meminta PJPUR untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu dan menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan PJPUR. PJPUR wajib menggunakan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Uang Rupiah di masyarakat dalam kondisi yang layak edar, PJPUR wajib memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terdapat 12 PJPUR pada wilayah Bandung.

5) Kegiatan Penukaran Uang Valuta Asing (KUPVA)

KPwdn BI Jabar mengawasi 16 badan KUPVA yang telah berizin. KUPVA, atau yang biasa disebut *Money Changer*, pada wilayah Jawa Barat menurut undang-undang harus berbentuk PT dengan minimal modal disetor Rp100,000,000,- Pengawasan dilakukan untuk menghindari transaksi ilegal dan kegiatan penukaran valuta asing yang terkendali. Pengawasan dilakukan secara off-sidedan *on-side*. Pengawasan *off-side* dilakukan melalui laporan transaksi 2 tahun sekali. Kendala pada pengawasan KUPVA ialah masih banyaknya KUPVA ilegal yang terdapat di daerah Jawa Barat, terutama di daerah Sukabumi. Sehingga masih terjadi proses sosialisasi dan edukasi bagi pemilik KUPVA untuk mengikuti peraturan serta pelaporan kepada Bank Indonesia. Pengawasan KUPVA berkaitan dengan PPATK mengenai ada tidaknya *money laundering*.

4.6.2 Fungsi Analisis SP, PUR, KI dan Perlindungan Konsumen

Keuangan inklusif menurut KPWdn BI Jabar ialah sistem dan layanan keuangan yang dapat diakses dan disediakan oleh semua lapisan pihak-pihak. Baik dari segi pemakaian dan penyedia. Dalam Fungsi Analisis SP, PUR, KI dan Perlindungan Konsumen ini KPWdn Jabar telah melakukan berbagai program strategis, yaitu:

1. Implementasi perluasan program Elektronisasi Transaksi Penerimaan dan Pembayara Pemerintah di Daerah, diantaranya

ialah Penggunaan Kartu Bandug Smart Card (BSC) pada sarana transportasi umum *Trans Metro* Bandung, Program Bank Sampah & Elektronisasi transaksi pada event PON XIX

2. Perluasan pelaksanaan edukasi terkait elektonifikasi dan keuangan inklusif pada masyarakat. Edukasi diberikan sebanyak enam kali pada triwulan I, 11 kali pada triwulan II, lima kali pada triwulan III dan enam kali pada triwulan IV tahun 2016. Edukasi dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan konsumen terhadap perkembangan elektronifikasi dan keuangan inklusif sehingga tujuan perekonomian tercapai
3. Implementasi agen Layanan Keuangan *Digital* (LKD) terbaru. Target implementasi LKD terbaru yang dipantau oleh KPwdn BI Jabar ialah agen dari Bank BRI dan Bank Mandiri dimana yang dicapai oleh kedua bank tersebut pada bulan September 2016 adalah 15123 agen. Agen LKB membantu Bank Indonesia untuk mencapai suatu sistem keuangan yang inklusif
4. Pemetaan Potensi Pondok Pesantren dalam kegiatan *Islamic Financial Inclusion* melalui LKD. Pasa KPwdn BI Jabar terdapat dua pesantren yang saat ini telah menjadi proses agen LKD yaitu Pondok Pesantren Al-Masoem dan Pondok Pesantren Musbahunnur.

Pelaksanaan dari program strategis KPwdn BI Jabar tersebut mempunyai beberapa tantangan, diantaranya ialah:

1. Masyarakat masih lebih menyukai transaksi tunai
2. Sistem teknologi yang masih terdapat ketidaksiapan
3. Beberapa masyarakat menghindari alat keuangan untuk menghindari bunga
4. Kebudayaan yang belum menerima teknologi

Berkaitan dengan hal diatas beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi tantangan hal tsb ialah melalui edukasi dan penciptaan sistem *National Payment Gateway Sistem* (NPG) menurut Bank Indonesia adalah infrastruktur yang mengintegrasikan berbagai saluran (*channel*) pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik. Prinsip yang dianut Bank Indonesia dalam mengembangkan *NPG* adalah dengan mempertimbangkan akseptansi stakeholder, *time to market*, *settlement*, keamanan, kompetisi yang sehat dan mengedepankan kepentingan nasional. Dengan adanya NPG maka sistem keuangan inklusif KPWdn BI Jabar bisa dapat termudahkan pelaksanaannya, terutama untuk kartu *Bandung Smart Card* (BSC)

4.6.3 Kegiatan Selama di Pengawasan SP, PUR & KI

Kegiatan Tim Pengawasan Sistem Pembayaran, PUR, KI dilaksanakan pada Selasa, 25 Januari 2017. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan diskusi, pembelajaran dan sharing informasi kegiatan pada Tim Pengawasan Sistem Pembayaran, PUR, KI. Diskusi dibuka pada pagi hari oleh Kepala Tim yaitu Bapak Hermawan. Bapak Hermawan menyampaikan kegiatan Tim Pengawasan Sistem Pembayaran PUR KI

secara keseluruhan dan dilanjutkan oleh bagian fungsi Pengawasan Bapak Budiawan dan fungsi Analisis Bapak Hando yang menjelaskan secara teknis kegiatan Tim dari setiap fungsi.

BAB V

KESIMPULAN

Bank Sentral adalah lembaga keuangan sentral yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Pentingnya peranan bank sentral dapat dilihat dari tiga fungsi utama yaitu (i) fungsi yang terakait sebagai otoritas sistem pembayaran, (ii) fungsi sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dan (iii) fungsi yang terkait sebagai otoritas perbankan dalam menjaga kesehatan bank dan stabilitas sitem keuangan.

Seiring berjalannya perkembangan bank sentral di nusantara, Bank Indonesia (BI) hingga saat ini menjadi salah satu lembaga keuangan negara yang memiliki peran besar bagi sistem perekonomian Indonesia. Untuk memaksimalkan kinerjanya, BI memiliki struktur organisasi yang fungsional dan juga mendirikan kantor – kantor perwakilan di dalam maupun luar negeri. Kantor perwakilan BI dalam negeri tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia terdiri dari kantor perwakilan provinsi maupun kabupaten/kota.

Kantor perwakilan dalam negeri provinsi Jawa Barat, terletak di Jl. Braga No. 108., Bandung. Pembangunan gedung kantor tersebut telah memiliki perjalanan sejarah dari jaman penjajahan Belanda. Bangunan lama masih berdiri disamping bangunan baru kantor tsb. Kantor perwakilan provinsi ini juga bertanggung jawab atas kantor perwakilan BI kabupaten/kota dibawahnya seperti Tasikmalaya, Serang, dan Cirebon. Struktur organisasi SDM di dalamnya terdiri atas 2 grup besar yaitu Grup *Advisory & Pengembangan Ekonomi* dan Grup SP, PUR,

Layanan dan Administrasi. Dan 2 fungsi lainnya yaitu *Internal Control Officer* (ICO) dan *Performance Manager* (PM)

Berdasarkan pengalaman praktik kerja lapangan di KPw BI Provinsi Jawa Barat yang dijalani, penyusun di perkenalkan ke 5 (lima) divisi yang ada di kantor tsb diantaranya divisi asesmen & ekonomi keuangan (DAEK), divisi operasional sistem pembayaran (SP), satuan layanan dan administrasi (SLA), tim pengelolaan uang rupiah (PUR) , dan tim pengawasan SP, PUR & Keuangan Inklusif.

Penyusun mendapat kesempatan untuk ditempatkan di tiap divisi selama 1-2 hari. Tiap divisi menyampaikan pembekalan materi berupa tugas pokok & produk pokok yang dijalankan. Beberapa divisi tertentu juga memberikan tugas khusus bagi peserta praktik kerja lapangan seperti pembuatan makalah, men-sortir hasil survey dan juga ikut serta dalam praktik operasional sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2016. *Slides*. Organisasi dan SDM Bank Indonesia (OSDI) KPw

BI Prov Jabar. 40 hal.

Bank Indonesia. 2016. *Slides*. Sosialisasi Ketentuan Bilyet Giro.

Peraturan Bank Indonesia (PBI)

<http://www.bi.go.id/id/Default.aspx>

<http://archive.kaskus.co.id>

<http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata>

LAMPIRAN



Lampiran 1 Tim Pengawasan SP PUR dan KI



Lampiran 2 Tim PUR dan Operasional SP



Lampiran 3 Unit Layanan dan Administrasi KAS



Lampiran 4 Fungsi Logistik



Lampiran 5 Fungsi SDM



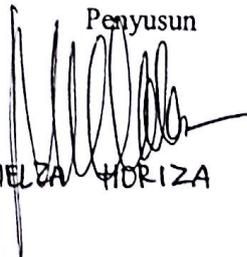
Lampiran 6 : PKL dari universitas lainnya

Lampiran 8: Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Mahasiswa

PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA MAHASISWA

Nama : MELZA HORIZA
 NIM : 20141111102
 Program Studi : MANAJEMEN
 Tempat Praktik Kerja : KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat Praktik Kerja : Jl. Braga No. 108

No	Kegiatan	Waktu	Januari											
			16	17	18	19	20	23	24	25	26	27		
1	Asesmen Ekonomi.K.	09.00-17.00	✓	✓										
2	Satuan layanan & administrasi	09.00-17.00			✓	✓								
3	Kliring & Akuntansi	07.00-18.00					✓							
4	Pengelolaan uang rupiah	09.00-17.00						✓						
5	Pengawarsan SP non tunai	09.00-17.00							✓					
6	Pengembangan ekonomi	09.00-17.00								✓	✓			
7	Laporan kegiatan magang	08.00-17.00												✓

Penyusun

 (MELZA HORIZA)

Mengetahui:

Dosen Pembimbing


 (PAJAR H.)

Pembimbing Lapangan


 (.....

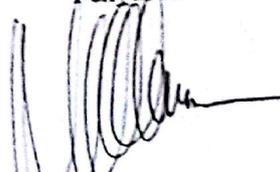
Lampiran 6: Catatan Harian Praktik Kerja Mahasiswa

CATATAN HARIAN PRAKTIK KERJA MAHASISWA

Nama : MELZA HORIZA
 NIM : 20191111102
 Program Studi : MANAJEMEN
 Tempat Praktik Kerja : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat Praktik Kerja : Jl. Braga no 108

No	Hari/Tgl	Jam (dari...sd...)	Jumlah Jam	Uraian Kegiatan	Hasil	Paraf PL	Keterangan
1	Senin (16/1)	09.00 - 17.00	8 jam	Diskusi		✓	
2	Selasa (17/1)	09.00 - 17.30	8,5 jam	Mengerjakan asesmen		✓	
3	Rabu (18/1)	09.00 - 17.00	8 jam	Diskusi		✓	
4	Kamis (19/1)	09.00 - 17.00	8 jam	Diskusi		✓	
5	Jumat (20/1)	07.00 - 18.00	11 jam	Diskusi & Kliring		✓	

Penyusun


 (MELZA HORIZA)

Mengetahui:

Dosen Pembimbing


 FAJAR H.
 (.....)

Pembimbing Lapangan


 (.....)

Lampiran 5: Daftar Hadir

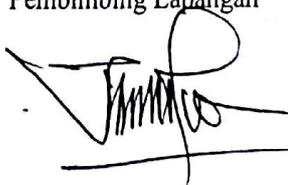
DAFTAR HADIR PROGRAM PRAKTIK KERJA MAHASISWA

Nama : MELZA HORIZA
 NIM : 20141111102
 Program Studi : MANAJEMEN
 Tempat Praktik Kerja : KPW Bank Indonesia Jawa Barat
 Alamat Praktik Kerja : Jl. Braga No 108

No	Hari	Tanggal	Datang		Pulang		Keterangan
			Jam	Paraf*)	Jam	Paraf*)	
1	Senin	16 Jan	06.45	✓	17.00	✓	
2	Selasa	17 Jan	07.00	✓	17.00	✓	
3	Rabu	18 Jan	07.10	✓	17.00	✓	
4	Kamis	19 Jan	07.15	✓	18.30	✓	
5	Jum'at	20 Jan	06.45	✓	18.00	✓	
6	Senin	23 Jan	07.15	✓	17.00	✓	
7	Selasa	24 Jan	07.10	✓	17.00	✓	
8	Rabu	25 Jan	07.15	✓	17.00	✓	
9	Kamis	26 Jan	07.10	✓	17.00	✓	
10	Jum'at	27 Jan	07.06	✓	17.00	✓	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Keterangan: I = ijin; S=sakit; A=Alpha
 *) di paraf oleh pembimbing Lapangan

Mengetahui:
 Pembimbing Lapangan



EVALUASI SIKAP MAHASISWA PRAKTIK KERJA

Nama : MELZA HORIZA
 NIM : 2014111102
 Program Studi : MANAJEMEN
 Tempat Praktik Kerja : KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat : Jl. Braga No. 108

No	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI			
		1	2	3	4
1.	HUBUNGAN ANTAR MANUSIA				
	a. Mengadakan pendekatan kepada orang yang terkait dalam pekerjaan				✓
	b. Dapat berkomunikasi dengan semua orang yang terkait dalam pekerjaan				✓
2.	PARTISIPASI & INISIATIF MAHASISWA DI TEMPAT PRAKTIK KERJA			✓	
3.	TANGGUNG JAWAB DALAM TUGAS				
	a. Menerima beban tugas sesuai dengan prosedur				✓
	b. Melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya				✓
	c. Menggunakan setiap kesempatan untuk belajar/mendapatkan pengalaman			✓	
	d. Meninggalkan tempat tugas setelah melakukan timbang terima tugas				✓
4.	KEJUJURAN				
	a. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di tempat Praktik Kerja				✓
	b. Membuat laporan sesuai data yang ada				✓
	c. Menandatangani daftar hadir sesuai waktu kehadirannya			✓	
	d. Mengakui kesalahan yang telah dilakukan/tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain				✓
5.	KEDISIPLINAN				
	a. Datang tepat waktunya			✓	
	b. Mentaati tata tertib/ketentuan-ketentuan yang berlaku di tempat praktik dan pendidikan				✓
6.	SOPAN SANTUN				
	Menghargai orang lain, yaitu terhadap:				
	a. Klien/masyarakat				✓
	b. Teman sejawat				✓
	c. Anggota tim				✓

Lampiran 9: Evaluasi Sikap Mahasiswa Praktik Kerja (Lanjutan)

No	KOMPONEN YANG DINILAI	Nilai			
		1	2	3	4
7.	KERJASAMA				
	a. Tidak sering terjadi kesalahpahaman dalam bekerja secara tim				✓
	b. Dapat bekerjasama dalam tim				✓
8.	PENAMPILAN DIRI				
	a. Pakaian bersih dan rapi				✓
	b. Cekatan				✓
	c. Sabar			✓	
	d. Tidak ragu-ragu dalam bertindak			✓	
9.	KETELITIAN				
	a. Dalam melaksanakan tugas, tidak sering melakukan kesalahan yang sama				✓
	b. Teliti menyelesaikan tugas dan hasilnya baik			✓	
10.	KEMATANGAN PROFESIONAL				
	a. Dalam melaksanakan tugas bertindak dengan tenang			✓	
	b. Meruhasiakan dan menghindari pembicaraan yang tidak perlu tentang Nasabah/Klien/masyarakat				✓
JUMLAH SKOR		96			

*) diisi oleh Pembimbing Lapangan

Bandung, 27 Jan 2017

Keterangan:

Konversi Nilai:

- 4: Sangat Baik
- 3: Baik
- 2: Cukup
- 1: Kurang

Penilai

Pembimbing Lapangan



(.....)

Lampiran 10: Evaluasi Keterampilan Mahasiswa

EVALUASI KETRAMPILAN MAHASISWA PRAKTIK KERJA

Nama : MELZA HORIZA
 NIM : 2019111102
 Program Studi : MANAJEMEN
 Tempat Praktik Kerja : KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat : Jl. Braga No. 108

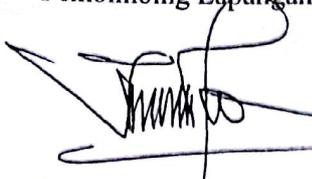
No	KOMPONEN YANG DINILAI	Nilai			
		1	2	3	4
1.	PEMAHAMAN PERUSAHAAN/BANK				
	a. Pengetahuan organisasi perusahaan			✓	
	b. Pengetahuan tentang produk utama perusahaan				✓
	c. Pengetahuan dan pemahaman fungsi setiap bagian perusahaan			✓	
	d. Pengetahuan dan pemahaman Job Deskripsi setiap bagian perusahaan				✓
	e. Pemahaman sistem dan prosedur kerja antar bagian dalam perusahaan			✓	
2.	RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN				
	a. Kemampuan merencanakan kegiatan			✓	
	b. Kesesuaian rencana dengan realisasi			✓	
	c. Ketepatan waktu rencana dengan realisasi			✓	
	d. Kesesuaian rencana dengan kompetensi mahasiswa			✓	
	e. Kesesuaian rencana dengan bidang kerja di bagian perusahaan			✓	
3.	KEBERHASILAN PENYELESAIAN MASALAH				
	a. Kemampuan mengidentifikasi masalah			✓	
	b. Kecepatan menyelesaikan masalah			✓	
	c. Ketepatan menyelesaikan masalah			✓	
JUMLAH SKOR				41	

*) diisi oleh Pembimbing Lapangan

Keterangan:
 Konversi Nilai:
 4: Sangat Baik
 3: Baik
 2: Cukup
 1: Kurang

Bandung, 27 Jan 2017

Penilai
 Pembimbing Lapangan


 (.....)

EVALUASI PENGETAHUAN MAHASISWA PRAKTIK KERJA

Nama : MELZA HORIZA
 NIM : 2019111102
 Program Studi : MANAJEMEN
 Tempat Praktik Kerja : KPw Bank Indonesia Prov. Jawa Barat
 Alamat : Jl. Braga No. 108, Bandung

No	KOMPONEN YANG DINILAI	Nilai			
		1	2	3	4
1.	TATA TULIS LAPORAN				
	a. Kebenaran ejaan			✓	
	b. Kesesuaian penulisan dengan buku panduan			✓	
	c. Relevansi materi dengan judul			✓	
2.	PRESENTASI				4
	a. Media penyampaian materi				✓
	b. Penyampaian materi sistematis				✓
	c. Penguasaan materi				✓
	d. Kedalaman materi			✓	
	e. Kesuaian jawaban dengan pertanyaan			✓	
	f. Eyes contact				✓
	g. Gerak tubuh				✓
JUMLAH SKOR				3	5

*) diisi oleh Dosen Penguji/Dosen Pembimbing

Keterangan:
 Konversi Nilai:
 4: Sangat Baik
 3: Baik
 2: Cukup
 1: Kurang

Jakarta 2507 2017

Penilai

Dosen Pembimbing


 (..... FAJAR H.....)

Lampiran 12: Rekapitulasi Nilai Akhir Praktik Kerja

Nama : MELZA HORIZA ✓
 NIM : 2014111102 ✓
 Program Studi : Manajemen ✓
 Tempat Praktik Kerja : KPw Bank Indonesia Prov. Jawa Barat ✓
 Alamat : Jl. Braga No. 108 Bandung ✓

Keterangan	Sikap (Pembimbing Lapangan) Bobot 25%	Keterampilan (Pembimbing Lapangan) Bobot 35%	Pengetahuan (Dosen Pembimbing) Bobot 40%	Interval NA (*). Total Nilai Akhir	NILAI HURUF
1. Nilai Per komponen	Nilai=(skor yang didapat/108)x100 $(96/108) \times 100$	Nilai=(skor yang didapat/52)x100 $(41/52) \times 100$	Nilai=(skor yang didapat/40)x100 $(35/40) \times 100$	80-100 68-79 56-67 40-55 <40	A B C D E
	= 88.89	= 78.84	= 87.5		
2. Nilai Akhir (=bag.1xbobot)	= 22.23	= 27.89	= 35	*) 84.82	A

Jakarta, ^{25 07}..... 2017

Dosen Pembimbing Praktik Kerja


 (..... FAJAN H.)